

BAB V

KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, isu-isu yang diperbincangkan bukan hanya mencakup isu-isu tradisional saja seperti perang. Setelah berakhirnya perang dingin, isu-isu dalam studi hubungan internasional semakin lebar, tidak hanya membahas isu-isu *high politics* tetapi juga membahas isu-isu *low politics*. Bahkan dalam dua dekade terakhir forum internasional banyak membahas isu non-tradisional sebagai fokus utama dalam studi hubungan internasional. Kemunculan isu non-tradisional seperti masalah pencari suaka dan pengungsi menjadi salah satu fokus utama dunia internasional saat ini. Kemunculan masalah pencari suaka kebanyakan disebabkan oleh faktor domestik dimana negara asal tidak dapat memberi jaminan keamanan bagi warga negaranya, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan negara asal mereka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Australia adalah salah satu negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi untuk dapat meneruskan hidup mereka. Negara ini dianggap dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka karena merupakan salah satu negara dengan tingkat ekonomi stabil di Kawasan Asia Pasifik. Selain hal tersebut, alasan geografis menjadi faktor pendukung kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Australia karena lebih dekat dengan banyak negara konflik seperti Myanmar dan negara Asia Selatan. Dengan kenaikan jumlah pencari suaka yang meningkat secara drastic di awal pemerintahan John Howard membuat Australia mengimplementasikan *pacific solution* sebagai langkah untuk menahan laju kedatangan pencari suaka yang melalui jalur laut atau disebut IMA's atau boat people. Tetapi pada faktanya kebijakan tersebut dianggap banyak merugikan pencari suaka hanya demi melindungi Australia dari kedatangan pencari suaka. Pencari suaka yang melalui jalur laut harus ditahan di pusat detensi yang terletak di pulau Manus dan Nauru. Hal ini mendapat sorotan dari dunia internasional karena pada faktanya pelanggaran hak asasi manusia terjadi

akibat kebijakan ini. Dari segi sarana, pusat detensi tidak menyediakan fasilitas dasar yang diperlukan manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Selain itu banyak kasus bunuh diri terjadi karena pencari suaka yang ditahan di pusat detensi pesimis dan tidak mendapat kepastian hingga kapan mereka akan berada di tempat tersebut tanpa ada titik terang kapan akan dilakukan pemrosesan visa. Masalah pelecehan seksual dan pemerkosaan juga kerap terjadi di pusat detensi tanpa adanya perlindungan hukum bagi pencari suaka, ditambah lagi anak-anak juga ditahan di pusat detensi. Hal tersebut menjadikan kebijakan *pacific solution* menjadi kontroversial dan menjadi perbincangan di forum internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi amnesty international dalam andilnya mengadvokasi pencari suaka akibat dari kebijakan *pacific solution* yang diterapkan kembali oleh Australia. Dalam penelitian ini dibagi kedalam lima bab dimana didalam bab I membahas latar belakang permasalahan yang terjadi hingga mendorong keikutsertaan amnesty international dalam masalah tersebut. Dalam bab II menjelaskan gambaran singkat profil amnesty international, agenda dalam penegakan HAM di dunia serta sebagai *global social movement*. Sementara di dalam bab III menjelaskan tentang sejarah kebijakan Australia dalam isu pencari suaka sekaligus sejarah kedatangan pencari suaka ke Australia dan juga respon dunia internasional dalam masalah ini. Di dalam bab IV menjelaskan analisis strategi yang dilakukan amnesty international dalam masalah terkait dan di tutup kesimpulan di bab V.

Melihat permasalahan ini, amnesty international muncul sebagai salah satu INGO yang memperjuangkan hak asasi manusia untuk turut berkontribusi dalam mengadvokasi pencari suaka yang ditahan di pusat detensi. Amnesty international merupakan salah satu INGO dengan cabang atau sections dan structure yang tersebar di lebih dari 100 negara yang telah berdiri sejak tahun 1961 dan bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dunia. Bentuk advokasi amnesty international sangat beragam,

mulai dari publikasi, kampanye, diskusi dengan inter-government agencies seperti PBB, dan masih banyak lagi. Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh amnesty international merupakan usaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam proses advokasinya, amnesty international memberikan bantuan berupa moral dan materi terhadap permasalahan pencari suaka di Australia. Wujud dukungan moral dari amnesty international dapat berupa tekanan yang diberikan kepada pemerintah Australia seperti misalnya rekomendasi *Better Plan Act*. Selain hal tersebut bentuk dukungan materi berupa keberhasilan program CSP untuk menempatkan pengungsi di Australia.

Pertanyaan kajian yang terdapat di dalam bab I adalah “*Bagaimana peran Amnesty International dalam menanggapi kebijakan pencari suaka pemerintah Australia?*”. Dalam penelitian ini pertanyaan tersebut terjawab dengan analisis aktivitas yang dilakukan amnesty international dengan melibatkan banyak aktor lain termasuk INGO, NGO lokal dan IGO. Aktivitas amnesty international berupa pembingkai cerita melalui fakta dan testimoni untuk memperoleh dukungan internasional ada didalam bab IV. Bentuk keberhasilan ini berupa kecaman dan kritik banyak negara dalam forum tahunan UN Human Rights Council.

Terdapat dua alasan mengapa penelitian ini dapat dikategorikan sebagai masalah dalam studi hubungan internasional. Pertama adalah international-non-governmental organization seperti amnesty international merupakan salah satu aktor penting dalam dunia internasional selain pemerintah dan IGO’s karena memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat internasional untuk bergerak terhadap suatu isu. Tekanan internasional dapat juga muncul sebagai bentuk keberhasilan INGO dalam membingkai cerita sehingga dunia internasional dapat memberikan tekanan terhadap isu yang sedang diperbincangkan. International non-governmental organization dapat mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh aktor lain seperti pemerintah lokal. Kedua adalah isu non-tradisional seperti masalah pencari suaka dan pengungsi merupakan masalah global yang perlu segera di tangani.

Permasalahan isu pencari suaka dan pengungsi melibatkan banyak negara karena mereka berpindah dari satu negara ke negara lain sehingga perlu adanya sinergi dari dunia internasional untuk mengatasi masalah ini.

Implementasi konsep NGO strategi ke empat oleh David Korten dapat dilihat dari bagaimana amnesty international menentang kebijakan Australia dalam isu pencari suaka. Berdasarkan konsep tersebut, amnesty international bekerja secara global, hal ini dilihat dari sections dan structure yang amnesty international punya di lebih dari 100 negara di dunia. Selain hal tersebut amnesty international juga bekerja tidak hanya dengan international government agencies seperti PBB dan badan-badannya seperti UNHCR dan UNICEF, tetapi amnesty international juga menjalin kerjasama dengan international non-governmental organization lainnya seperti Save the Children dan Refugee Council of Australia. Amnesty international melihat bahwa terdapat kegagalan fungsi dan elemen-elemen politik, dimana Australia seakan mengabaikan tekanan dan kecaman dari dunia internasional terkait kebijakannya dalam isu pencari suaka yang dianggap dunia internasional melanggar hak asasi manusia. Amnesty international sendiri dapat dikategorikan sebagai INGO dengan sifat reformis karena menentang kebijakan Australia yang dianggap tidak sesuai dengan visi amnesty international.

Hipotesis dalam skripsi ini adalah “*Amnesty International* mencoba melakukan advokasi terhadap pencari suaka akibat kebijakan Australia dalam kebijakan *Pacific Solution* dengan beberapa cara seperti penyediaan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Australia melalui kebijakan terhadap asylum seeker (*Information politics*), mengkampanyekan penentangan terhadap kebijakan Australia (*Symbolic politics*), dan membangun jaringan advokasi dengan aktor internasional dan juga aktor lokal (*Leverage politics*)”. Hal ini dapat dibuktikan dalam analisis didalam bab IV yang memuat ketiga strategi tersebut.

Dengan menggunakan konsep transnational advocacy networks (TAN) oleh Keck dan Sikkink, penelitian ini dapat membuktikan dua hal penting. Pertama adalah kemunculan international non-governmental organization yaitu amnesty international dan kedua adalah strategi yang digunakan oleh amnesty international dalam mengadvokasi isu pencari suaka Australia. Penelitian ini melihat kemunculan amnesty international dalam isu pencari suaka Australia karena didasari oleh beberapa alasan. Pertama adalah kegagalan pemerintah Australia untuk menciptakan kebijakan terkait pencari suaka yang linier dengan sifat kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia. Kedua adalah desakan dunia internasional pasca pembungkaman cerita seputar isu pencari suaka hingga mengundang simpati hingga isu ini menjadi salah satu topik utama dalam forum internasional. Salah satu keberhasilan amnesty international dalam hal ini adalah dengan dikirimkannya laporan dari special rapporteur yang digunakan dalam forum UN Human Rights Council untuk membahas masalah kebijakan Australia dalam isu pencari suaka.

Hal kedua yang dapat dibuktikan dalam penelitian ini adalah strategi advokasi yang dilakukan oleh amnesty international berdasarkan konsep transnational advocacy network (TAN). Information politics, symbolic politics dan leverage politics merupakan strategi yang digunakan amnesty international dalam mengadvokasi isu pencari suaka sebagai akibat dari kebijakan Australia.

Strategi pertama adalah information politics yang dilakukan oleh amnesty international melalui berbagai media untuk menyebarkan informasi mengenai fakta dan cerita yang dialami oleh pencari suaka di pusat detensi. Fakta dan testimoni yang ditampilkan di berbagai media yang digunakan amnesty international bertujuan untuk membungkam cerita sehingga informasi yang disampaikan memiliki kekuatan yang kuat. Hasilnya isu kebijakan pencari suaka Australia menjadi isu yang diperbincangkan oleh dunia internasional. Strategi kedua adalah symbolic politics melalui kampanye #KidsOffNauru dan “My New Neighbour”.

Dengan kampanye melalui media yang dipergunakan amnesty international, hal ini berhasil menjalin dukungan dari berbagai pihak antara lain dengan INGO Save the Children dalam kampanye #KidsOffNauru. Wujud symbolic politics ini bertujuan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menekan Australia. Strategi ketiga adalah leverage politics dengan melibatkan aktor lain yaitu Refugee Council of Australia, Council lokal dan UNHCR serta UNICEF sebagai international governmental agencies. Dalam strateginya ini berhasil dicapai Trump Deal untuk memindahkan 1200 pencari suaka di Nauru secara bertahap dan juga diselenggarakannya UNHCR annual consultations with NGO's. Selain itu keberhasilan leverage politics yang dijalankan oleh amnesty international adalah dengan disepakatinya community sponsorship program oleh pemerintah Australia.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan peran amnesty international dalam isu pencari suaka akibat kebijakan Australia telah dibuktikan dengan analisis yang menggunakan konsep NGO strategi keempat oleh David Korten dan juga konsep transnational advocacy network (TAN) oleh Keck dan Sikkink. Meskipun demikian, dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dalam penelitian mendatang. Meskipun demikian penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meninjau peran amnesty international dalam merespon kebijakan pencari suaka pemerintah Australia.